

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
SISTEM PELAYANAN PENGADUAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMPERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG**



Oleh:

Rokmatus Sholikhah Amini

1961094

**PROGRAM STUDI MANAJAMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
PGRI DEWANTARA
JOMBANG
2022**

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
SISTEM PELAYANAN PENGADUAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMPERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG





Oleh:

Rokmatas Sholikhah Amini
NIM.1961094

Jombang, 9 September 2022

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan


(Dr. Siti Zuhroh, M.Si)
NIDN.00111096902


(Rokmatas Sholikhah Amini)

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

(Tri Afridah Indraswati, SE)
NIP. 19710408 199703 2 005

Mengetahui,
Ka. Prodi Manajemen

(Dr. Erminati Pancaningrum, S.ST., MSM)
NIDN.0716097202

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini yang berjudul “Sistem Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan tepat waktu.

Hal ini tak lepas dari beberapa bantuan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Berkat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Rohim, SE, M.Si., CRA selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang.
2. Ibu Dra. Siti Zuhroh, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan STIE PGRI Dewantara Jombang.
3. Ibu Erminati Pancaningrum, S.T., M.S.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang.
4. Bapak dr. Pudji Umbaran, M.KP selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) disini.
5. Ibu Tri Afridah Indraswati, SE selaku pendamping lapangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
6. Seluruh staff dan karyawan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
7. Keluarga dan teman-teman yang tercinta, yang telah memberikan semangat, do'a serta bantuan lainnya yang bermanfaat bagi penulis.

Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan mata kuliah Kuliah Kerja Magang (KKM) pada semester tujuh Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini, disadari bahwa sepenuhnya belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahan, baik dari segi penulisan maupun materi. Untuk itu diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun guna dapat menyempurkan kelengkapan laporan kuliah kerja magang ini. Semoga laporan kuliah kerja magang ini bermanfaat bagi kita semua.

Jombang, 9 September 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several vertical strokes and a small 'A' at the bottom right.

(Rokmatus Sholikhah Amini)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang.....	4
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	5
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....	6
2.1 Sejarah Perusahaan/instansi.....	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi.....	8
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Instansi.....	9
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG.....	12
3.1 Pelaksanaan Kerja yang dilakukan di tempat magang.....	12
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang.....	14
3.3 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi.....	17
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Dinas PPKBPPPA.....	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kegiatan Peserta KKM.....	23
Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Magang.....	26
Lampiran 3 Foto Kegiatan KKM.....	27
Lampiran 4 Lembar Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan.....	30
Lampiran 5 Lembar Penilaian Pendamping Lapangan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang

Pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam membentuk dan mengembangkan ketrampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Namun pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas. Guna dapat memahami dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka dari itu mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di perusahaan atau instansi yang relevan sesuai dengan program pendidikan yang diikuti. Sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa pelatihan kerja guna melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. Sebab, untuk bisa terjun langsung di dunia kerja tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan, namun juga diperlukan ketrampilan (skill) dan pengalaman pendukung untuk lebih menguasai bidang pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

Salah satu program yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM). KKM adalah kegiatan akademik (intrakurikuler) yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan praktek kerja secara langsung pada perusahaan atau instansi yang relevan sesuai dengan pendidikan yang dijalani mahasiswa dalam perkuliahan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kerja praktek dengan mengikuti semua aktivitas di lokasi KKM. Kegiatan ini sesuai dengan kurikulum program studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang, bahwa selama semester tujuh setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan KKM.

Kegiatan magang ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mata kuliah Kuliah Kerja Magang (KKM). Selain itu diharapkan mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu yang didapatkan dari kampus guna memberi manfaat bagi masyarakat khususnya perusahaan atau instansi yang dituju.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak secara fisik, dan emosional. Kekerasan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua Bentuk Perlakuan Salah Secara Fisik Dan Emosional, Penganiayaan Seksual, Penelantaran, Atau Eksploitasi Secara Komersial Atau Lainnyayang Mengakibatkan Gangguan Nyata Atau pun Potensial Terhadap Perkembangan, Kesehatan, Dan kelangsungan Hidup Anak Atau pun Terhadap Martabatnya Dalam Konteks Hubungan Yang Bertanggung Jawab, Kepercayaan, Atau Kekuasaan”. Terdapat banyak teori berkaitan dengan kekerasan pada anak, di antaranya teori yang berkaitan dengan stres di dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orangtua, atau situasional. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku beda, anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun.

Luthans (2000), mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang

Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Namun, orang tua menyikapi hal tersebut adalah proses mendidik anak, padahal itu adalah salah satu tindak kekerasan terhadap anak. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. Oleh karena

itu mahasiswa tertarik untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang guna mengetahui lebih dalam bagaiman kinerja karyawan dan cara karyawan dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Di era globalisasi ini, setiap perusahaan maupun instansi telah menerapkan sistem pelayanan dalam setiap aktivitas operasionalnya untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau kinerja karyawan yang ada. Menurut (Kasmir, <https://epirints.ac.id>, 2016:189) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja.

Hal tersebut sangatlah penting diterapkan dalam dunia kerja guna meningkatkan kinerja karyawan. Dengan menerapkan faktor tersebut, diharapkan setiap individu bisa meningkatkan kualitas diri sehingga bisa memanaajemen pekerjaannya dengan baik. Dengan menerapkan sistem pelayanan pengaduan pada setiap aspek di Instansi tersebut diharapkan aktivitas operasional Instansi akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, tema yang diambil dalam laporan magang ini yaitu “Sistem Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

1. Tujuan Umum

- 1) Diharapkan dapat memperkenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja secara langsung.

2. Tujuan Khusus

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja.

- 2) Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pengetahuan ilmu manajemen serta aplikasinya dalam duniakerja.
- 3) Diharapkan dapat meningkat softskill mahasiswa terkait kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku.

1.3 Manfaat Kuliah KerjaMagang

1. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Memperkenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja secara langsung.
- 2) Meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pengetahuan manajemen serta kemampuan softskill yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

2. Manfaat bagi STIE PGRI DewantaraJombang

Kegiatan kuliah kerja magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini bermanfaat sebagai menjalin hubungan yang baik dengan Dinas PPKB PPPA. Dan laporan kuliah kerja magang ini bermanfaat sebagai tambahan informasi atau referensi bagi pembaca, serta sebagai acuan untuk bahan pembelajaran.

3. Manfaat bagi Dinas PPKBPPPA

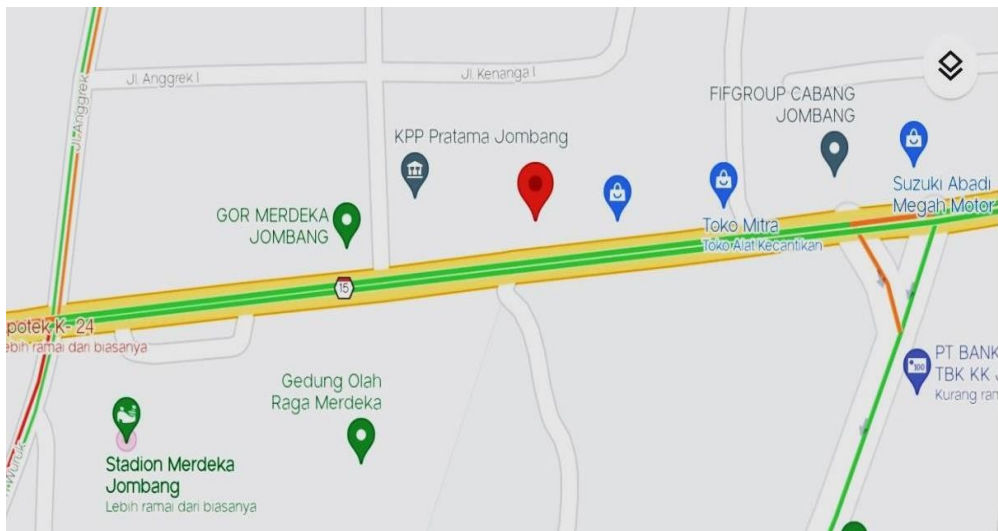
Perizinan kegiatan kuliah kerja magang ini sebagai bukti perhatian oleh Dinas PPKB PPPA terhadap masyarakat khususnya mahasiswa. Staff Dinas dan mahasiswa bisa bertukar informasi dan pengetahuan mengenai kegiatan di Dinas PPKB PPPA. Begitupun sebaliknya, mahasiswa bisa memberikan bakti kepada staff Dinas melalui pengetahuan maupun kinerja yang dibutuhkan di Dinas PPKB PPPA.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang dilaksanakan di :

Nama Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat Instansi : Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.135 B, Candi Mulyo, Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur 61419



Gambar 1.1 Lokasi Dinas PPKB PPPA

Sumber: <https://maps.app.goo.gl/mYG9i7cks7uX8BpAA>

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Berdasarkan Kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semester Ganjil tahun ajaran 2022/2023, maka kuliah kerja magang ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022. Tanggal tersebut sesuai dengan usulan mahasiswa dan atas izin dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Sejarah Perusahaan/instansi

Pembangunan di bidang kependudukan, kualitas penduduk, kualitas keluarga dan kesetaraan gender, merupakan sektor yang sangat strategis dan perlu direncanakan secara komprehensif, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan dua sisi yang berbeda. Satu sisi jika pertumbuhan penduduk memiliki kualitas yang baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya jika pertumbuhan penduduk berkualitas rendah, disamping akan menyebabkan beban negara yang semakin besar, juga menyebabkan permasalahan lain seperti pengangguran, pernikahan perempuan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kriminalitas dan dampak negatif lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk akan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan di sektor lainnya.

Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang merupakan gambaran tujuan, sasaran dan program kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Profil ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan kebijakan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga pra sejahtera, menurunkan angka unmet need, meningkatkan kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Perencanaan Program Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R), pelatihan dan sosialisasi Keluarga Kepala Keluarga (PEKKA), Pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta pelayanan lainnya.

Visi Kabupaten Jombang adalah “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Untuk melaksanakan Visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal Dan Industri.

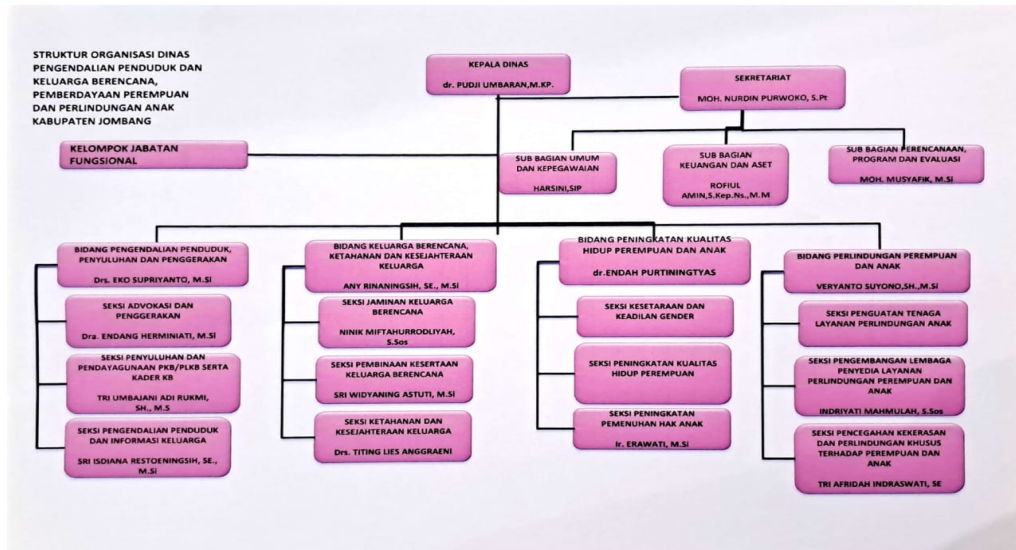
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2018, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mendukung pencapaian misi ke-2 Kabupaten Jombang, yaitu Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai sosial dan beragama yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan langsung untuk ikut mewujudkan misi tersebut. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengendalian penduduk, kualitas penduduk, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, secara terpadu dan sinergi bersama Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Jombang.

Beberapa hal yang menjadi langkah-langkah utama yang perlu dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
4. Program perlindungan perempuan dan anak.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB PPPA

Sumber: Data milik Dinas PPKB PPPA

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang meliputi:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 - a) Seksi Advokasi Penggerakan

- b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta Kader Berencana;
 - c) Seksi Pendataan dan Informasi Keluarga;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
- a) Seksi Pelayanan dan Jaminan Keluarga Berencana;
 - b) Seksi Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana;
 - c) Seksi Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, membawahi:
- a) Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - c) Seksi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :
- a) Seksi Penguatan Tenaga Layanan Perlindungan anak
 - b) Seksi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c) Seksi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Salah satu bentuk sinergitas antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dengan dibentuknya program dan kegiatannya yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pembangunan Gedung Kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
 - e) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
 - f) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
- a) Penyusunan rencana strategis SKPD
 - b) Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
 - c) Penyusunan laporan keuangan SKPD
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
- a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
 - b) Peningkatan peran serta organisasi, kelompok dan lembaga perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum
 - c) Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan kualitas hidup perempuan
 - d) Koordinasi/Fasilitasi peningkatan pemenuhan hak anak
 - e) Peningkatan kualitas tenaga layanan anak
5. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- a) Peningkatan kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak
 - b) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - c) Fasilitasi Pencegahan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
6. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a) KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan PUP
 - b) Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - c) Pendataan dan Up_dating Data program KKBPK
 - d) Pengadaan BKBKIT

7. Program PengendalianPenduduk

- a) Fasilitasi pelayanan KB Medis Operasi dan Kontrasepsilainnya
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk
- c) Advokasi dan KIE PengendalianPenduduk

8. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

- a) Dukungan Media KIE dan Managemen BOKB
- b) Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB
- c) Balai Penyuluhan KB
- d) Distribusi Alkon
- e) Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditentukan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, masing-masing individu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda agar terciptanya system kerja yang efektif dan efisien. Untuk jadwal operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dilakukan lima hari dalam seminggu, yakni pada hari Senin - Kamis untuk jam operasional di mulai pukul 07.00 WIB - 15.00 WIB, sedangkan khusus pada hari jum'at untuk jam operasional di mulai pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja yang dilakukan di tempat magang

Berdasarkan kalender akademik STIE PGRI Dewantara Jombang dan pelaksanaan kuliah kerja magang yang telah ditetapkan, maka mahasiswa melakukan praktek magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 9 September 2022. Tanggal tersebut berdasarkan usulan mahasiswa dan atas izin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah ditentukan oleh pihak Dinas, mahasiswa ditempatkan di bagian umum. Untuk sistem kerja atau tugas-tugas, setiap karyawan telah ditentukan tanggung jawab masing-masing sesuai struktur organisasi SOP yang ada.

Adapun jadwal kerja karyawan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni lima hari dalam seminggu, yakni pada hari Senin - Kamis untuk jam operasional di mulai pukul 07.00 WIB - 15.00 WIB, sedangkan khusus pada hari jum'at untuk jam operasional di mulai pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB. Berikut beberapa peraturan yang diterapkan:

1. Pada pukul 07.00 WIB setiap karyawan harus melakukan absensi dengan Finger Print.
2. Seluruh karyawan wajib mengikuti apel pagi.
3. Memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Menjalankan tugas sesuai Jobdesk masing-masing.
5. Pada pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB waktu istirahat, sholat dan makan.
6. Waktu pulang sesuai jam yang telah ditentukan.

Dalam praktek kuliah kerja magang ini, mahasiswa menempati Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ada 2 (dua) program yaitu Program Perlindungan Khusus Anak dan Perlindungan Perempuan, dapat diketahui bahwa tugas mahasiswa adalah membantu Sub

Koordinator dalam mengerjakan tugas sesuai lingkup di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Seringkali Sub Koordinator menjalankan kegiatan Pendampingan Kasus dan Penjangkauan kasus.

Namun kadangkala mahasiswa juga ikut serta membantu menyiapkan administrasi peserta kegiatan guna mencapai target tahunan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

- a) Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b) Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sekolah
- c) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- d) Pelatihan Manajemen Kasus PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
- e) Pelatihan Mediator Kasus
- f) Pelatihan Manajemen kasus dan Penanganan Kasus

Adapun fokus Jobdesk pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yakni sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Penyusunan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan anak dan pemenuhan hak anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan anak dan pemenuhan hak anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 4) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan anak dan pemenuhan hak anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 5) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan anak dan pemenuhan hak anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan anak dan pemenuhan hak anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penguatan tenaga perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Berdasarkan hasil pengamatan selama aktivitas kuliah kerja magang bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerapkan atau mengimplementasikan Pelayanan dalam aktivitas pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal tersebut sangat membantu meningkatkan produktivitas Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Mayoritas Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki rentang umur di atas 35 tahun. Sehingga mereka mengalami kendala dalam Menerima pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Jika seluruh karyawan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mahir dalam menerima pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan sangat memudahkan dalam pelaksanaan tugas yang dimiliki. Hal tersebut tentu akan sangat efisien dan efektif jika seluruh karyawan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mau dan dapat belajar dalam setiap pelayanan pengaduan. Dengan demikian diperlukan komitmen dalam perusahaan atau organisasi pada tiap individu/karyawan untuk lebih mendalami SOP dalam Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Jombang. Anak-anak dan perempuan korban kekerasan yang mengalami trauma akan mendapatkan layanan sebagai berikut:

- Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma.
- Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan.
- Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Jombang termasuk tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari data SIMFONI se-Jawa Timur yang menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Jombang diketahui pada tahun 2019 sebanyak 109 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 143 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 63 kasus di tahun 2022 januari hingga Agustus sebanyak 49 kasus yang di dominasi dari kasus persetubuhan sampai kehamilan anak dibawah umur. Dari data tersebut diketahui Kabupaten Jombang tercatat termasuk kabupaten yang memiliki angka kekerasan yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain se-Jawa Timur.

Di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berupa :

1. Penerimaan Rujukan Pengaduan

2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

Pengaduan masyarakat dapat dikategorikan pengaduan langsung dan tidak langsung. Penerimaan pengaduan langsung didapatkan dari korban atau orang tua atau pihak masyarakat atau lembaga rujukan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan yang datang secara langsung. Kegiatan ini sudah berjalan di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak seperti pengaduan kasus secara langsung oleh masyarakat. Pengaduan tidak langsung dapat diartikan bahwa pelapor melaporkan permasalahan perempuan dan anak tidak datang langsung ke Bagian Pengaduan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak namun melalui WhatsApp, Call Center 112 dan Web “**Ayo Lapor Anak Jombang**”, Web tersebut inovasi dari UNICEF. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor.

Ada beberapa pertimbangan pelapor tidak melaporkan langsung ke Bagian Pengaduan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena terkendala jarak, transportasi, waktu, kondisi fisik atau psikis, keterbatasan dana, takut, malu dan lain sebagainya. Walaupun korban tidak melaporkan secara langsung, tapi petugas layanan wajib memberikan layanan serta perlu memastikan kebenaran pengaduan pelapor. Adapun jenis pengaduan beragam terkait urusan perempuan dan anak, mulai dari proses penerimaan, analisis dan klarifikasi aduan untuk mencari kebenaran obyektif dari masalah, bisa juga sebagai pengaduan tidak langsung.

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri agar tidak sampai ke rana hukum. Pengertian dari **Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat**

(PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang sudah berjejaring dengan lembaga/instansi seperti:

1. Polres Jombang
2. Kejaksaan Negeri Jombang
3. RSUD Jombang
4. Dinas Sosial
5. Peksos (Pekerja Sosial)
6. WCC (Women Crisis Center)
7. LPA (Lembaga Perlindungan Anak)

Menurut (Soekidjan, 2009) Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Dengan adanya komitmen dalam jiwa tiap karyawan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang berguna bagi pengembangan dan kemajuan pelayanan pengaduan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Guna mendukung pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap karyawan perlu meningkatkan komitmen dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak dan mengikuti Pelatihan Penanganan Manajemen Kasus demi meningkatnya tugas pokok dan fungsi karyawan. Mengingat betapa pentingnya suatu komitmen dalam perusahaan/organisasi, maka komitmen tersebut harus dibangun, dipelihara serta ditingkatkan. Dengan memperkuat komitmen karyawan dalam suatu perusahaan/organisasi dapat dilakukan menggunakan dua cara yakni dengan mengurangi tuntutan kerja dan meningkatkan kemampuan karyawan.

Menurut (Robbins, 2001) cara meningkatkan komitmen karyawan dalam organisasi, yakni sebagai berikut:

1) Mengurangi Tuntutan Karyawan

- a. Menentukan Prioritas yang bertujuan mengurangi tuntutan kerja karyawan dengan melakukan aktivitas yang berguna dan menunda atau menghilangkan aktivitas yang tidak berguna.
- b. Menetapkan fokus, tuntutan karyawan dapat terlalu tinggi karena tidak terpusatkan, sebuah perusahaan dapat melakukan dengan menerapkan beberapa aktivitas yang sangat penting saja. Dalam hal ini fokus dengan menentukan tema bagi aktivitas perusahaannya
- c. Melakukan rekayasa, rekayasa proses produksi dapat mengurangi tuntutan kerja karyawan, rekayasa tersebut dapat berupa memperpendek jalur, otomatisasi, dan penyederhanaan kerja.

2) Meningkatkan Kemampuan Karyawan;

- a. Kontrol adalah memberikan karyawan kewenangan untuk mengontrol keputusan mengenai bagaimana mengerjakan pekerjaan mereka
- b. Strategi atau visi yaitu menawarkan kepada karyawan visi dan arahan yang membuat mereka memiliki komitmen untuk berkerja keras.
- c. Tantangan kerja yaitu memberi karyawan stimulasi kerja

yang dapat mengembangkan ketrampilan baru

- d. Kolaborasi dan team work adalah membentuk tim untuk melakukan pekerjaan
- e. Kultur kerja yaitu membangun suatu lingkungan dan suasana keterbukaan, menarik, menyenangkan dan penuh penghargaan
- f. Membagi keuntungan adalah memberikan kompensasi kepada karyawan karena menyelesaikan pekerjaan dengan baik
- g. Komunikasi yaitu menyebarkan informasi sesering mungkin dan secara terbuka
- h. Perhatian adalah memastikan bahwa setiap karyawan diperlakukan sesuai martabatnya.
- i. Teknologi yaitu memberikan karyawan teknologi yang membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah.
- j. Pelatihan dan pengembangan adalah memastikan karyawan memiliki keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan di atas, mahasiswa telah selesai melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan baik dan tertib. Dari aktivitas magang yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga tanggal 9 September 2022, mahasiswa memperoleh pengalaman dan wawasan mendalam mengenai dunia kerja, khususnya pada instansi pemerintah. Mahasiswa memperoleh pengetahuan lebih mengenai bagaimana aktivitas pengelolaan data kasus dan cara menerima pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara langsung hingga merujuk kasus ketika korban dari hasil asesment mengalami trauma psikis dan menyadari bahwa masyarakat di kabupaten jombang sudah berani melapor dengan adanya kasus yang menimpa kepada mereka dan berkoordinasi dengan Tim Jejaring P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Mahasiswa dapat menerapkan bagaimana cara kerja sama antar tim, public speaking yang baik serta membangun public relation yang baik dengan para karyawan di tempatmagang.

Mahasiswa juga mengetahui bagaimana komitmen setiap karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dalam organisasi/perusahaan/instansi. Komitmen organisasi sangatlah penting dibangun dan ditingkatkan dalam setiap individu/karyawan guna mendukung pengembangan tujuan-tujuanperusahaan/instansi.

4.2 Saran

A. Saran bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

Akan lebih baik pihak kampus atau Dosen Pembimbing Lapangan melakukan pengecekan minimal sekali ke tempat magang mahasiswa. Hal tersebut bertujuan agar dapat terjalin hubungan yang baik antara kampus dengan perusahaan/instansi tempat magang mahasiswa, dan ada baiknya jika pihak STIE berkerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mengenai program-program yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang untuk memahami lebih jauh bagaimana cara menangani masalah kekerasan fisik dan kekerasan emosional (bullying) yang ada di lingkup STIE PGRI Dewantara Jombang, serta mensosialisasikan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dikalangan mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang mengingat kasus kekerasan terjadi antara suka sama suka dan si pelaku rata-rata dari teman dekat.

B. Saran bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan kuliah kerja magang, mahasiswa memberikan masukan bagi Dinas PPKB PPPA khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mungkin bisa dijadikan referensi atau bahan evaluasi Dinas. Adapun saran yang diberikan yakni sebagai berikut :

- Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak seharusnya lebih bekerja sama dalam penyelesaian masalah dalam penanganan kasus
- Karyawan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak seharusnya lebih melatih kemampuan dalam pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Hasil atau kinerja yang baik seharusnya mendapat apresiasi dari atasan maupun bidang lain agar dapat memotivasi dan meningkatkan komitmen karyawan.














DAFTAR PUSTAKA

















- DPR RI. (2014, October 24). *UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*. Dipetik December 10, 2021, dari referensi.elsam.or.id.
- Kemen PPPA. (2014, October 17). *UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Dipetik September 14, 2022, dari peraturan.bpk.go.id.
- Luthans. (2000:10). *Definisi stres*. Dipetik September 14, 2022, dari <http://feb.unila.ac.id>.
- Gie. (2021, June 25). *Aktivitas Operasi: Pengertian Lengkap dan Cara erjanya dalam Bisnis*. Dipetik December 10, 2021, dari <https://accurated.id>.
- Ikhsan. (2020, December 20). *Apa Itu Digitalisasi Serta Perannya di Dunia Bisnis dan Industri*. Dipetik December 10, 2021, dari <https://sasanadigital.com>.
- Kasmir. (2016:189). Dipetik December 15, 2021, dari <https://epirints.ac.id>.
- Robbins. (2001). *Perilaku Organisasi*. Dalam *Edisi 8* (hal. 140). Jakarta: Prentice Hall.
- Soekidjan. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.



Lampiran 1 Daftar Kegiatan Peserta KKM

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Rokmatus Sholikhah Amini
 NIM : 1961094
 Program Studi : Manajemen KS2A SDM Manajemen 2019
 Tempat KKM : Dinas PPKB PPPA
 Bagian/Bidang : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	1 Agustus 2022	Membantu melaksanakan Respon kasus di kecamatan Gudo	
	2 Agustus 2022	Membantu Membuat Undangan Kegiatan Sosialisasi Desa Bebas KDRT	
	3 Agustus 2022	Membantu membagikan undangan Sosialisasi Desa Bebas KDRT	
	4 Agustus 2022	Membantu melakukan Pendampingan Visum korban ke RSUD	
	5 Agustus 2022	Membantu kegiatan Sosialisasi Desa Bebas KDRT	
II	8 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
	9 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
	10 Agustus 2022	Membantu melaksanakan penjangkauan kasus	
	11 Agustus 2022	Membantu memasukkan data kasus ke SIMFONI	
	12 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
III	15 Agustus 2022	Membantu melaksanakan pendampingan kasus di Polres Jombang	
	16 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
	17 Agustus 2022	Membantu kegiatan Pelatihan	

		Manajemen kasus PATBM	
	18 Agustus 2022	Membantu menyiapkan SPJ	
	19 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
IV	22 Agustus 2022	Membantu kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan kasus	
	23 Agustus 2022	Membantu menyiapkan SPJ	
	24 Agustus 2022	Membantu respon kasus	
	25 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
	26 Agustus 2022	Membantu menyelia data kasus	
V	29 Agustus 2022	Membantu kegiatan Pelatihan Mediator Kasus	
	30 Agustus 2022	Membantu menyiapkan SPJ	
	31 Agustus 2022	Membantu melaksanakan penjangkauan kasus	
	1 September 2022	Membantu Membagikan leaflet dan standing banner "STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK" di 21 Kecamatan	
	2 September 2022	Membantu melanjutkan membagikan leaflet dan standing banner di kecamatan	
VI	5 September 2022	Membantu menyelia daftar peserta kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	
	6 September 2022	Membantu menyiapkan undangan peserta	
	7 September 2022	Membantu menyiapkan ATK Peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	

	8 September 2022	Membantu kegiatan Sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	
	9 September 2022	Penutupan	

Jombang, 9 September 2022
 Pendamping Lapangan,



(Tri Afrida Indrawati, SE)

Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No : 161 Telp. (0321) 861881 Fax (0321) 866432

J O M B A N G

Jombang, 14 September 2022

Nomor : 420/2457 /415.38.2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan selesai
Melakukan magang

Kepada
Yth. Kepala STIE PGRI Dewantara
Kabupaten Jombang
di-
JOMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : dr. PUDJI UMBARAN, M.KP
NIP : 19680410 200212 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang

Menerangkan bahwa :
Nama : ROKMATUS SHOLIKHAH AMINI
NIM : 1961094
Prodi : Manajemen
Jurusan : Sumber Daya Manusia

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Magang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 9 September 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PPKB, PPPA
KABUPATEN JOMBANG


Dr. PUDJI UMBARAN, M.KP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 200212 1 006

Lampiran 3 Foto Kegiatan KKM

Respon Kasus Persetubuhan di Kecamatan Gudo



Kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan KtP/A dan TPPO



Kegiatan Pelatihan MANAJEMEN KASUS PATBM
(Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)



Kegiatan Pelatihan Mediator Kasus

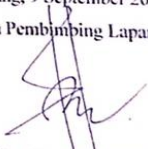


Kegiatan Distribusi Leaflet dan Standing Banner di Kecamatan



Lampiran 4 Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Keaktifan konsultasi	92
2.	Motivasi	92
3.	Pengetahuan tentang tugas dalam obyek KKM	92
4.	Tata Bahasa dan kerapihan laporan	92
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	92
6.	Sistematika laporan	92
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	92
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	92
Jumlah		736
Nilai Rata-Rata		$736/8 = 92$

Jombang, 9 September 2022
Dosen Pembimbing Lapangan,

(Dr. Siti Zuhroh, M.Si)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA
PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)
Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807
Jombang 61471 Email : info@stiedewantara.ac.id website:
www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Rokmatus Sholikhah Amini
NIM : 1961094
Program Studi : Manajemen
Tempat Magang : Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang
Bagian/Bidang : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5 Penilaian Pendamping Lapangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website: www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Nama : Rokmatus Sholikhah Amini
NIM : 1961094
Program Studi : Manajemen
Tempat Magang : Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang
Alamat Tempat Magang : Jln. Kh Abdurakhman Wahid No. 161 Jombang
Bagian/Bidang : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Disiplin kerja	93
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	93
3.	Sikap, etika dan tingkah laku saat bekerja	95
4.	Kreativitas dan ketrampilan	90
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	90
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	93
7.	Kemampuan berkomunikasi	95
8.	Produktivitas Kerja*	
Jumlah		649
Nilai Rata-Rata		92,7

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

*Peserta magang menghasilkan produk/ karya

Catatan:

Jombang, 9 September 2022

Pendamping Lapangan/Pejabat Penilai**,


(Tri Afridah Indraswati, SE)

** dituliskan nama pejabat penilai disertai tanda tangan dan stempel perusahaan/instansi